

Dampak Fintech Illegal dan Penegakan Hukumnya di Indonesia

Martinus Ahmad, Ahmad Abdul Ghoni, Sri Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id; martinusahmad348@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2395](https://doi.org/10.59999/v9i1.2395)

Received:
19-03-2023

Revised:
27-04-2023

Accepted:
11-05-2023

Abstract: *Fintech, short for financial technology, has brought significant changes to the way we conduct financial transactions, access financial services, and manage personal finances. However, the rapid growth of Fintech has also created opportunities for illegal practices in this sector. In this abstract, we will discuss the impact of illegal Fintech on the economic level of society. Illegal fintech refers to illegal practices carried out by companies or individuals operating in the Fintech sector without proper permits or regulation. The negative impact of illegal Fintech can be seen from several perspectives. Illegal practices within the Fintech sector can have a negative impact on the economy as a whole. This can reduce public confidence in the Fintech industry in general and hinder the growth of sectors that actually have great potential to support economic development. Illegal fintech often targets people who do not have adequate access to formal financial services. As a result, already vulnerable communities may become targets of these illegal practices and face higher risks of exploitation and fraud. To overcome the impact of illegal Fintech on the economic level of society, several actions can be taken including: The government needs to improve the regulatory framework and supervision of the Fintech sector to reduce illegal practices. Fintech companies must be granted proper licenses and closely monitored to ensure compliance with applicable regulations. Public education and awareness about the risks of illegal Fintech is very important. The public needs to be provided with sufficient information on how to identify illegal Fintech and report it to the competent authorities.*

License:
Copyright (c)
2023 Martinus
Ahmad, Ahmad
Abdul Ghoni,
Sri Wahyuni

Keywords: *law enforcement, illegal fintech*

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Fintech, singkatan dari teknologi keuangan, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita melakukan transaksi keuangan, mengakses layanan keuangan, dan mengelola keuangan pribadi. Namun, pertumbuhan pesat Fintech juga telah menciptakan peluang bagi praktik ilegal di sektor ini. Dalam abstrak ini, akan dibahas dampak Fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat. Fintech ilegal merujuk pada praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang beroperasi di sektor Fintech tanpa izin atau regulasi yang tepat. Dampak negatif Fintech ilegal dapat terlihat dari beberapa perspektif. Praktik ilegal dalam sektor Fintech dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri Fintech secara umum dan menghambat pertumbuhan sektor yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi. Fintech ilegal sering kali menasar masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal. Akibatnya, masyarakat yang sudah rentan dapat menjadi sasaran praktik ilegal ini dan menghadapi risiko lebih tinggi terhadap eksploitasi dan penipuan. Untuk mengatasi

dampak Fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat, beberapa tindakan dapat diambil diantaranya; Pemerintah perlu meningkatkan kerangka regulasi dan pengawasan terhadap sektor Fintech untuk mengurangi praktik ilegal. Perusahaan Fintech harus diberikan izin yang tepat dan diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko Fintech ilegal sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai tentang cara mengidentifikasi Fintech ilegal dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.

Kata kunci: Penegakan Hukum, fintech ilegal

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (*Fintech*) telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan. Fintech telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan keuangan, mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan tradisional, dan meningkatkan inklusi keuangan di banyak negara.¹ Namun, di sisi lain, pertumbuhan Fintech juga telah memunculkan praktik ilegal di sektor ini. *Fintech illegal* merujuk pada kegiatan atau praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang beroperasi di sektor Fintech tanpa izin atau regulasi yang diperlukan. Praktik ilegal ini meliputi penipuan, pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan gelap, dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan masyarakat secara finansial dan ekonomi. Dampak Fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat dapat sangat merugikan, baik bagi individu maupun perekonomian secara keseluruhan.²

Fintech ilegal dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan masyarakat yang terlibat. Praktik ilegal seperti penipuan atau investasi ilegal dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu yang menjadi korban. Hal ini dapat mengurangi daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Fintech ilegal dapat merusak citra dan kepercayaan terhadap sektor Fintech secara keseluruhan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor Fintech legal yang sebenarnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal sering kali menjadi sasaran Fintech ilegal. Praktik ilegal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan akses keuangan, membatasi kesempatan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Pertumbuhan Fintech ilegal juga dapat membawa risiko sistemik bagi perekonomian. Praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris dapat merusak integritas sistem keuangan secara keseluruhan, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Praktik ilegal dalam sektor Fintech dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital secara umum. Masyarakat

¹ Abdullah, A. Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 11 No.2 (2021), hlm. 108-114.

² Purwanto, et al. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, 11 No 1 (2022), hlm. 80-91.

dapat menjadi skeptis dan enggan menggunakan layanan Fintech legal, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor Fintech secara keseluruhan.

Dalam rangka mengatasi dampak Fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan industri Fintech. Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antarpihak dapat membantu melindungi masyarakat dari Fintech ilegal dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam sektor Fintech. Dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah; Bagaimana Menjalankan Bisnis Fintech di Indonesia secara Resmi? Fintech P2P Lending Ilegal Marak Beredar di Indonesia, Bagaimana Penegakan Hukumnya?

PEMBAHASAN

Bagaimana Menjalankan Bisnis Fintech di Indonesia secara Resmi

Untuk menjalankan bisnis Fintech secara resmi di Indonesia, ada beberapa langkah dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Berikut adalah panduan umum untuk memulai bisnis Fintech yang sah di Indonesia:³

1. Identifikasi Jenis Layanan Fintech

Tentukan jenis layanan Fintech yang ingin Anda tawarkan. Ini bisa berupa platform pembayaran, pinjaman peer-to-peer, pembiayaan digital, asuransi berbasis teknologi, atau jenis layanan Fintech lainnya.

2. Persiapan Rencana Bisnis

Buat rencana bisnis yang komprehensif yang mencakup strategi operasional, keuangan, pemasaran, dan kepatuhan hukum. Rencana bisnis ini harus mencerminkan visi, misi, dan model bisnis yang jelas untuk bisnis Fintech.

3. Pendirian Perusahaan

Bentuk entitas hukum yang sesuai untuk bisnis Fintech, seperti perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam hal ini, Anda perlu mengikuti prosedur pendirian perusahaan yang ditetapkan oleh hukum perusahaan Indonesia.

4. Izin dan Regulasi

Identifikasi izin dan regulasi yang diperlukan untuk operasional Fintech. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sektor keuangan, termasuk Fintech. Anda perlu memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin yang relevan dari OJK sesuai dengan jenis layanan Fintech yang Anda tawarkan.

5. Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Konsumen

³ Andaiyani, et al. Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 1 No. 2 (2020), 85-92.

Pastikan untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan anti-pencucian uang, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen. Anda harus memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang kuat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil.

6. Sistem Teknologi dan Infrastruktur

Bangun sistem teknologi yang handal dan aman untuk mendukung operasional bisnis Fintech. Pastikan bahwa infrastruktur teknologi yang mampu mengatasi volume transaksi yang tinggi, menjaga keamanan data, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik.

7. Kolaborasi dan Kemitraan

Pertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan tradisional, penyedia layanan pembayaran, atau mitra lain yang dapat memperkuat model bisnis Fintech Anda. Kemitraan ini dapat membantu dalam pemenuhan persyaratan hukum, peningkatan kepercayaan, dan memperluas jangkauan layanan.

8. Pelaporan dan Audit

Pastikan untuk melaporkan aktivitas bisnis dan keuangan Anda secara teratur kepada otoritas yang berwenang dan mematuhi persyaratan pelaporan dan audit yang berlaku. Dalam setiap langkah di atas, penting untuk berkonsultasi dengan profesional hukum atau ahli keuangan yang berpengalaman dalam industri Fintech dan peraturan Indonesia. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih rinci dan spesifik sesuai dengan kebutuhan bisnis Fintech.

Penegakan Hukum Pada Fintech P2P Lending Ilegal Marak Beredar di Indonesia

Maraknya fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal dan penyalahgunaan.⁴ Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap fintech P2P lending ilegal di Indonesia

1. Identifikasi dan Penyelidikan

Pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bekerja sama untuk mengidentifikasi platform fintech P2P lending ilegal yang beroperasi di Indonesia. Tim-tim khusus dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap praktik ilegal ini.

2. Tindakan Hukum

Setelah identifikasi dan penyelidikan, tindakan hukum diambil terhadap pelaku fintech P2P lending ilegal. Penegakan hukum dapat berupa penghentian

⁴ Mauliza, et al. Pengaruh Perlindungan Data Dan Cyber Security Terhadap Tingkat Kepercayaan Menggunakan Fintech Masyarakat Di Surabaya. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1 No. 11 (2022), 2497-2516.

operasional platform ilegal, penangkapan dan penuntutan pelaku ilegal, serta pembekuan aset yang terkait dengan praktik ilegal tersebut.

3. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Selain penegakan hukum, kampanye kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan bahaya penggunaan fintech P2P lending ilegal. Pemerintah, lembaga pengawas, dan media memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai ciri-ciri fintech P2P lending ilegal dan pentingnya menggunakan platform yang legal dan terdaftar.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Teknologi

Pemerintah dan lembaga pengawas bekerja sama dengan lembaga keuangan dan teknologi yang sah untuk mengidentifikasi dan melaporkan fintech P2P lending ilegal. Kolaborasi ini membantu dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk penegakan hukum.

5. Perkuat Regulasi

Pemerintah meningkatkan regulasi dan persyaratan untuk mendirikan dan mengoperasikan *platform fintech P2P lending*. Persyaratan yang lebih ketat diberlakukan untuk memastikan hanya platform yang memenuhi standar keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen yang tinggi yang diizinkan beroperasi.

6. Peran Lembaga Pengawas

OJK sebagai lembaga pengawas keuangan memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap fintech P2P lending ilegal. OJK memiliki wewenang untuk memberikan peringatan, memblokir akses, atau mencabut izin operasional bagi platform fintech P2P lending ilegal. Penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum terhadap fintech P2P lending ilegal adalah proses yang berkelanjutan.⁵ Pemerintah dan lembaga pengawas terus meningkatkan upaya mereka dalam menangani praktik ilegal ini guna melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan sektor fintech di Indonesia. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan praktik ilegal yang mereka temui kepada otoritas yang berwenang.

Berkaca dengan Pengawasan P2P Lending di Singapura, di Singapura, pengawasan terhadap platform P2P lending dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yaitu lembaga pengawas keuangan nasional di negara tersebut. MAS memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan dan stabilitas sektor P2P lending di Singapura.⁶ Berikut adalah beberapa aspek pengawasan P2P lending di Singapura:

- Regulasi dan Lisensi

⁵ Maulana, et al. Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Strategic Management 5 No 1 (2022)

⁶ Fachrurrazy, et al. Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2 No. 2 (2020), 154-171.

MAS memiliki peraturan yang mengatur operasional platform P2P lending di Singapura. Platform P2P lending harus memperoleh lisensi dari MAS untuk dapat beroperasi secara legal. Prosedur lisensi melibatkan peninjauan ketat terhadap model bisnis, keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta persyaratan keamanan data dan perlindungan konsumen.

- **Persyaratan Keuangan dan Modal**

MAS menetapkan persyaratan keuangan yang harus dipenuhi oleh platform P2P lending. Platform tersebut harus memiliki modal yang memadai untuk memastikan kelayakan operasional dan penanganan risiko yang efektif. Persyaratan modal bertujuan untuk melindungi kepentingan peminjam dan investor.

- **Perlindungan Konsumen**

MAS memastikan adanya perlindungan konsumen yang memadai dalam layanan P2P lending. Mereka menetapkan standar transparansi, integritas, dan perlindungan data yang harus dipatuhi oleh platform P2P lending. MAS juga mendorong platform untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada peminjam dan investor, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

- **Manajemen Risiko**

MAS mewajibkan platform P2P lending untuk memiliki kebijakan dan praktik manajemen risiko yang kuat. Ini termasuk penilaian kredit yang cermat, diversifikasi portofolio pinjaman, pengawasan kualitas pinjaman, dan mitigasi risiko terhadap kegagalan pembayaran. MAS juga memantau kinerja portofolio pinjaman platform untuk memastikan tingkat keberhasilan yang memadai.

- **Pengawasan dan Audit**

MAS melakukan pengawasan dan audit terhadap platform P2P lending secara berkala. Mereka memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, keandalan sistem teknologi, perlindungan data, serta pelaporan keuangan dan operasional. Audit ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem P2P lending dan mencegah potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan.

- **Sanksi dan Penegakan Hukum**

Jika platform P2P lending melanggar peraturan atau gagal mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MAS, mereka dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan lisensi. Selain itu, MAS juga dapat melibatkan tindakan penegakan hukum jika terdapat pelanggaran yang lebih serius. Pengawasan yang ketat oleh MAS di Singapura bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan platform P2P lending, melindungi kepentingan peminjam dan investor, serta menjaga integritas sektor keuangan negara tersebut.

Pinjol Ilegal Beri Dampak Negatif dan Rusak Industri Fintech

Pinjaman online (Pinjol) ilegal memberikan dampak negatif dan merusak industri fintech di beberapa cara berikut: Pinjol ilegal sering kali menerapkan suku bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi yang tidak jelas kepada peminjam.⁷ Praktik ini dapat menyebabkan beban finansial yang berat bagi peminjam dan memperburuk masalah keuangan mereka. Selain itu, praktik penagihan yang tidak adil dan agresif juga dapat memberikan tekanan psikologis yang besar pada peminjam. Pinjol ilegal sering kali menggunakan praktik penagihan yang kasar, mengintimidasi, dan melanggar privasi peminjam. Mereka mungkin menggunakan ancaman, pelecehan verbal, atau bahkan pemerasan untuk memaksa peminjam membayar hutang mereka. Hal ini merusak reputasi industri fintech secara keseluruhan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online. Pinjol ilegal tidak mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan tidak menyediakan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Mereka dapat mengabaikan persyaratan lisensi, mengabaikan persyaratan keamanan data, dan tidak memberikan transparansi yang cukup kepada peminjam. Ini berarti bahwa peminjam tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi masalah atau perselisihan.

Praktik pinjol ilegal dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Mereka mungkin tidak memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, seperti persyaratan modal yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan risiko kebangkrutan, penipuan, atau pencucian uang yang berdampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk melindungi industri fintech dan masyarakat dari dampak negatif pinjol ilegal, perlu adanya tindakan yang tegas. Pemerintah dan otoritas keuangan harus meningkatkan pengawasan, memberlakukan regulasi yang ketat, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pinjol ilegal.⁸ Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjol ilegal juga penting agar mereka dapat menghindari praktik ilegal dan memilih layanan pinjaman online yang legal dan terpercaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dampak fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa praktik ilegal tersebut dapat menyebabkan kerugian dan masalah serius bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah: Masyarakat yang menggunakan fintech ilegal rentan mengalami penipuan, suku bunga yang tidak wajar, biaya tersembunyi, atau praktik penagihan yang tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan beban keuangan yang berat dan memperburuk kondisi ekonomi individu dan rumah tangga. Fintech ilegal dapat mengganggu ekosistem keuangan yang sehat dan stabil. Hal ini dapat menghambat akses keuangan yang aman dan dapat dipercaya, menghambat pertumbuhan bisnis yang sah, dan menghambat investasi

⁷ Novika, et al. Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3 No 3 (2022), 1174-1192.

⁸ Wahyuni, et al. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 No. 3 (2019), 379-391.

yang produktif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat terhambat. Praktik fintech ilegal dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech secara keseluruhan. Masyarakat mungkin menjadi skeptis dan enggan menggunakan layanan fintech, termasuk yang legal dan sah. Hal ini dapat menghambat perkembangan dan adopsi inovasi fintech yang sebenarnya dapat memberikan manfaat positif.

SARAN

Untuk mengatasi dampak fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat, beberapa saran yang dapat diambil adalah: Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait fintech untuk memastikan adanya standar yang jelas dan ketat bagi platform fintech yang beroperasi. Regulasi yang kuat dapat membantu melindungi masyarakat, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan dalam industri fintech. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik fintech ilegal. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menghentikan operasi platform fintech ilegal. Pelaku ilegal harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko menggunakan fintech ilegal dan pentingnya menggunakan platform yang legal dan terpercaya. Masyarakat perlu diberikan informasi tentang ciri-ciri fintech ilegal, tanda peringatan, dan bagaimana melaporkan praktik ilegal kepada otoritas yang berwenang. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan industri fintech adalah kunci dalam mengatasi masalah fintech ilegal. Perlu ada dialog dan koordinasi yang baik untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi, memperkuat pengawasan, serta mempromosikan praktik yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan tindakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengawas, industri fintech, dan masyarakat, dampak fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat dapat dikurangi, sehingga menciptakan lingkungan fintech yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- Andaiyani, S., Yunisvita, Y., & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85-92.
- Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55-67.
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154-171.
- Khofsoh, F. Z., Setyaningrum, L. I., Saphira, A., Grace, P. A., & Parasetya, M. T. (2022). Pengaruh Etika Sosial Terhadap Antisipasi Fintech Lending Ilegal. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 5(1), 11-17.
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1).
- Mauliza, A. Y. I., Machmudi, R. D. S., & Indrarini, R. (2022). Pengaruh Perlindungan Data Dan Cyber Security Terhadap Tingkat Kepercayaan Menggunakan Fintech Masyarakat Di Surabaya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(11), 2497-2516.
- Novika, F., & Septivani, N. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174-1192.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91.
- Rachmawati, A., & Yudhawati, D. (2022). Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan. *Psycho Idea*, 20(2), 128-140.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.

